



## **Kerja Sama Pertanian Indonesia dengan Tiongkok dalam Kerangka ACFTA**

Karina Saphira

Universitas Padjadjaran, Indonesia; email: karinasaphira@yahoo.com

R. Widya Setiabudi Sumadinata

Universitas Padjadjaran, Indonesia; email: w.setiabudi@unpad.ac.id

Dina Yulianti

Universitas Padjadjaran, Indonesia; email: dina14@unpad.ac.id

| Submit: 09-02-2022

| Accept: 03-08-2022

| Publish: 12-08-2022

### **Keywords**

*ACFTA, agriculture, China, cooperation, free trade, Indonesia.*

### **ABSTRACT**

*ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) has increased trade between China and ASEAN countries, including Indonesia. Bilateral relations between Indonesia and China in various fields are also increasing. This study was conducted to explain the bilateral relations and trade between Indonesia-China in agriculture. This study is qualitative research by implementing free trade approach and bilateral relations. The data collection technique is a literature study with several stages, namely data collection, data reduction, and drawing conclusions. This study finds that the increasing of cooperation and trade between the two countries in agriculture has given positive results for Indonesia, including increasing the volume of Indonesia's exports to China for several food commodities. Bilateral relations between the two countries, including food trade, need to be continued even though Indonesia must maintain its food sovereignty and avoid a flood of imported food products that will weaken domestic agriculture.*

### **Kata Kunci**

*ACFTA, Indonesia, kerja sama perdagangan bebas, pertanian, Tiongkok*

### **ABSTRAK**

ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) telah mendorong peningkatan perdagangan antara Tiongkok dengan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Tiongkok di berbagai bidang pun semakin meningkat. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan hubungan bilateral dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok di bidang pertanian. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan perdagangan bebas serta hubungan bilateral. Teknik pengumpulan data adalah studi pustaka dengan beberapa tahapan yakni pengumpulan data, mereduksi data, hingga penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa peningkatan kerja sama dan perdagangan kedua negara di bidang pertanian memberikan hasil positif bagi Indonesia, antara lain meningkatnya volume ekspor Indonesia ke Tiongkok untuk beberapa komoditas pangan. Hubungan bilateral kedua negara, termasuk perdagangan pangan, perlu terus dilanjutkan meskipun Indonesia harus tetap menjaga kedaulatan pangannya dan menghindari membanjirnya produk pangan impor yang akan melemahkan pertanian di dalam negeri,

## PENDAHULUAN

ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) menjadi salah satu kesepakatan perdagangan bebas di antara negara anggota ASEAN dan Tiongkok yang telah diberlakukan selama lebih dari satu dekade. ACFTA menjadi perjanjian perdagangan bebas pertama ASEAN dengan pihak eksternal. Kesepakatan bebas tersebut membuat Tiongkok menjadi mitra dagang terbesar ASEAN sejak tahun 2009. Perdagangan antara ASEAN dan Tiongkok naik hingga lebih dari 200% sejak 2010, dari USD 235,5 miliar menjadi USD 507,9 miliar pada 2019 (18% dari total ASEAN). Ekspor ASEAN ke Tiongkok tumbuh rata-rata tahunan 10,4% dari 2010 hingga 2019 dibandingkan dengan 12,5% untuk impor ASEAN dari Tiongkok selama periode yang sama. Nilai investasi Tiongkok ke ASEAN mencapai USD 9,1 miliar pada 2019, menyumbang 5,7% dari total aliran FDI ke kawasan dan menempatkannya sebagai sumber FDI terbesar keempat di antara Mitra Dialog ASEAN (ASEAN.org, 2020).

Selain meningkatkan perdagangan dan investasi antara mereka, kemitraan perdagangan bebas ini juga mempererat hubungan bilateral, termasuk Indonesia dengan Tiongkok. Pada beberapa tahun terakhir, hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok terus meningkat terutama pada bidang ekonomi. Hal ini didorong oleh adanya ACFTA dan juga diplomasi ekonomi yang menjadi fokus utama politik luar negeri Indonesia sejak kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pada kunjungan pertamanya ke Tiongkok pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo mendorong penguatan kerja sama ekonomi dengan Tiongkok, khususnya sektor perdagangan, keuangan, perindustrian, pariwisata, infrastruktur, dan hubungan antar masyarakat. Hasilnya, perdagangan Indonesia dengan Tiongkok mengalami peningkatan yang signifikan dalam periode waktu 2014-2020, yaitu nilai ekspor meningkat dari 17,61 miliar USD menjadi 31,78 USD dan nilai impor meningkat dari 30,62 miliar USD menjadi 39,63 miliar USD (Bertagar.id, 2021). Begitu

juga dengan nilai investasi asing Tiongkok di Indonesia yang meningkat dari 2,7 miliar USD pada 2016 hingga 4,8 miliar USD pada 2020 (Katadata.co.id, 2021). Hubungan dalam sektor perindustrian juga menguat terlihat dari sejumlah kerja sama yang disepakati oleh kedua pihak, mulai dari kerja sama kereta cepat Jakarta-Bandung hingga kerja sama Kawasan industri twin park (Dinisari, 2021).

Selain kerja sama ekonomi, kerja sama dalam sektor pertanian juga menjadi perhatian pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun ini. Melihat perdagangan dalam sektor pertanian yang terus meningkat membuat kedua negara berupaya untuk terus memperkuat kerja sama bilateral mereka pada sektor agraria. Indonesia dan Tiongkok telah sepakat untuk memperkuat hubungan kerja sama agraris sejak tahun 2015 melalui Pernyataan Bersama tentang Penguatan Kemitraan Strategis Komprehensif antara Republik Rakyat Tiongkok dan Indonesia. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa kedua negara sepakat untuk memperkuat kerja sama pertanian melalui pengembangan tanaman komersil, penanaman padi hibrida, pertukaran teknologi pertanian, dan keamanan pangan.

Penting bagi Indonesia untuk mengamankan ACFTA demi kepentingan politik luar negeri. Kerja sama ini berperan penting dalam mempertahankan otonomi strategis Indonesia di Asia Timur dengan mengakomodasi Tiongkok sebagai "*rising power*". Tidak hanya melalui ACFTA, sebagai rekan strategis, Indonesia juga melibatkan Tiongkok dalam berbagai pertemuan ASEAN Plus dan mengakui Tiongkok sebagai mitra dialog penuh pertama ASEAN. Tidak hanya, ACFTA berperan penting dalam menegaskan relevansi dan kredibilitas ASEAN di awal pendiriannya (Ravenhill, 2006). Menjaga hubungan baik Indonesia-Tiongkok dalam kerangka ACFTA berarti melindungi kepentingan Indonesia dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, pembangunan, serta kerja sama regional/ internasional lainnya. Dengan penerapan strategi diplomasi yang baik dalam kerangka ACFTA, Indonesia juga dapat

mempererat hubungan kerja sama ekonomi intra-ASEAN dalam pilar-pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN (Prameswari, 2020).

Riset ini dilakukan untuk mengeksplorasi potensi kerja sama pertanian antara kedua negara di bawah kerangka ACFTA. Sementara itu, terdapat penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti kerja sama serta hubungan bilateral antara Indonesia dengan Tiongkok. Beberapa penelitian membahas tentang dampak kerja sama kedua negara dalam bidang-bidang tertentu. Misalnya Perwira (2019) yang menemukan bahwa kerja sama penanggulangan perdagangan narkoba antara Indonesia dengan Tiongkok tidak menunjukkan dampak yang signifikan karena masih banyak sindikat narkoba yang berasal dari Tiongkok yang memasarkan produk di Indonesia. Sementara Anwar (2019) yang menyoroiti penguatan kerja sama perdagangan dan investasi antara kedua negara menemukan bahwa penguatan hubungan ekonomi Indonesia dengan Tiongkok menyebabkan peningkatan kritik domestik terhadap praktik bisnis Tiongkok dan ketergantungan ekonomi Indonesia yang meningkat terhadap Tiongkok. Hasil penelitiannya merekomendasikan bahwa penting bagi Indonesia untuk mendiversifikasi sumber investasi dan pinjaman luar negeri, karena membiarkan Tiongkok terlalu dominan dapat menimbulkan resiko yang serius. Sementara itu, Vidianty dan Adibrata dkk. membahas tentang motivasi nasional Indonesia dalam menjalin kerja sama dalam berbagai bidang dengan Tiongkok. Selain itu, Vidianty (2015) menemukan bahwa Indonesia mengupayakan kerja sama bidang dirgantara dengan Tiongkok didorong oleh *national interest* Indonesia untuk memperkuat kapasitas mereka di kedirgantaraan dan antariksa. Begitu juga dengan hasil temuan dari Adibrata dkk. (2020) yang menyoroiti kerja sama OBOR antara Tiongkok dengan Indonesia. Mereka menemukan bahwa kerja sama tersebut didorong untuk memenuhi kepentingan nasional masing-masing negara, dimana keduanya memiliki ambisi bersama untuk

menjadikan sektor maritim sebagai salah satu kekuatan kedua negara dan keduanya juga berkeinginan untuk membangun penguatan ekonomi yang lebih baik.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang ada di atas, penelitian ini berfokus pada kerjasama antara Indonesia dengan Tiongkok dalam kerangka ACFTA di bidang pertanian. Penelitian ini mengkaji tentang potensi yang dapat dikembangkan menjadi kerja sama bilateral antara keduanya dalam bidang pertanian.

## **KERANGKA KONSEPTUAL**

### **Perdagangan Bebas**

Konsep tentang perdagangan bebas datang dari teori ekonomi dari Adam Smith yang lahir sejak abad ke-18. Berdasarkan argumen Smith, pembagian kerja antarnegara diarahkan pada keahlian tertentu yang dimiliki negara, optimalisasi efisiensi, dan produksi keseluruhan yang lebih tinggi. Dari perspektif suatu negara, suatu keuntungan praktis dapat dicapai melalui pembatasan perdagangan, terutama apabila negara tersebut merupakan produsen atau konsumen utama dari suatu komoditas. Namun, dalam praktiknya, perlindungan industri lokal mungkin terbukti hanya menguntungkan sebagian kecil penduduk, dan dapat merugikan yang lain (Barone, 2020). Sehingga, dalam perspektif ini, langkah memperluas akses dan mengurangi hambatan perdagangan antarnegara akan memudahkan peningkatan kesejahteraan.

Perdagangan bebas dapat didefinisikan sebagai kebijakan di mana pemerintah tidak memberikan diskriminasi pada pemasukan barang dari luar negeri (impor) atau mengganggu pengiriman barang ke luar negeri (ekspor) melalui penetapan tarif (pada impor) ataupun pemberian subsidi (pada ekspor). Melalui perdagangan bebas, jasa dan barang dapat diperjualbelikan melewati batas-batas internasional dengan sedikit atau bahkan tanpa tarif, subsidi, kuota, serta tanpa larangan-larangan yang dibuat pemerintah demi menghambat pertukaran barang dan jasa

tersebut. Namun begitu, kebijakan perdagangan bebas tidak berarti bahwa suatu negara mengabaikan semua kendali dan perpajakan atas impor dan ekspor (Barone, 2020).

Dalam pendekatan keunggulan komparatif yang dibawakan David Ricardo pada 1817, pasar bebas selalu memberikan manfaat untuk semua negara yang berpartisipasi. Prinsip keunggulan komparatif (*comparative advantage*) berarti kemampuan satu negara dalam memproduksi barang maupun menyediakan layanan atau jasa dengan biaya lebih rendah ketika dipadankan dengan negara lain. Ricardo menjelaskan bahwa setiap negara, tidak peduli seberapa tidak efisiennya struktur produksinya secara keseluruhan, selalu dapat mengekspor beberapa barang secara menguntungkan untuk membayar impor yang paling diinginkannya. Upah suatu negara mencerminkan tingkat produktivitas secara umum dan standar hidupnya secara keseluruhan, tetapi upah tidak menentukan daya saingnya atau barang mana yang akhirnya diekspor. Negara-negara dengan produktivitas keseluruhan yang tinggi akan memiliki upah yang tinggi, dan negara-negara dengan produktivitas keseluruhan yang rendah akan memiliki upah yang rendah (Gould, Woodbridge, & Ruffin, 2015).

Tidak dapat dihindari bahwa setiap negara memiliki industri dengan produktivitas di atas dan di bawah rerata. Industri dengan produktivitas tinggi suatu negara hanya perlu membayar upah pasar kompetitif negara itu, industri ini akan memiliki biaya relatif yang lebih rendah dan akan mampu bersaing di pasar dunia. Prinsip inilah yang menjadi dasar perdagangan. Misalnya, Amerika Serikat memiliki upah yang lebih tinggi daripada Meksiko, tetapi perbedaan ini tidak menghalangi Amerika Serikat untuk menjual produk ke Meksiko. Sebaliknya, industri AS dengan produktivitas lebih tinggi dari rata-rata, seperti industri komputer, dapat mengekspor sejumlah besar ke Meksiko dengan biaya lebih rendah daripada yang dapat diproduksi Meksiko. Demikian pula, Meksiko akan mengekspor barang dan jasa dari industrinya

dengan produktivitas lebih tinggi dari rata-rata karena industri ini akan memiliki keunggulan biaya di Amerika Serikat (Gould, Woodbridge, & Ruffin, 2015).

Perdagangan bebas pada umumnya memberikan sejumlah keuntungan untuk setiap negara. Pertumbuhan ekonomi negara dapat bertumbuh dengan lebih baik karena adanya perdagangan bebas. Sebagai contoh, melalui perjanjian NAFTA (Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara), Kantor Perwakilan Dagang milik Amerika Serikat mampu memacu pertumbuhan ekonomi AS hingga sebesar 5% per tahun. Selain itu, perdagangan bebas juga mampu memangkas pengeluaran negara. Sebelumnya, pemerintah seringkali memberikan subsidi pada industri lokal semisal pertanian sebab pendapatan mereka menjadi berkurang akibat penerapan kuota ekspor. Dengan dicabutnya kuota ekspor, pemasukan negara dari pajak berpotensi untuk digunakan pada keperluan nasional yang lain. Perdagangan bebas juga meningkatkan investasi asing dan transfer teknologi (Longley, 2018).

Secara umum, perdagangan bebas dibagi dalam tiga hal pokok, yakni perdagangan barang, jasa, serta investasi. Perdagangan bebas pada barang dilakukan dengan tujuan menghapus tarif serta menangani hambatan non-tarif. Sementara itu, perdagangan bebas pada jasa bertujuan melancarkan akses pasar serta memastikan kondisi dan situasi yang kondusif pada penyedia jasa agar dapat berkembang. Terakhir, perjanjian perdagangan bebas berupa investasi dilakukan dalam rangka melindungi dan memperkuat investasi.

Kebijakan perdagangan bebas pada umumnya dilakukan berdasarkan kesepakatan resmi serta bersifat timbal balik antara tiap negara yang terlibat. Meski begitu, perdagangan bebas tidak serta merta meninggalkan kontrol impor-ekspor antar negara. Pada kenyataannya, tidak banyak kesepakatan perdagangan bebas yang benar-benar menciptakan perdagangan bebas seutuhnya.

### **Hubungan Bilateral**

Hubungan bilateral secara sederhana dapat dipahami sebagai hubungan diplomatik antara dua negara yang dijalin untuk saling menguntungkan satu dengan yang lainnya. Hubungan bilateral memiliki peran strategis untuk mempromosikan kepentingan nasional dan penataan negosiasi internasional. Hal itu membuat hubungan bilateral sebagai strategi terbaik bagi negara untuk mencapai kepentingan mereka, dalam perdagangan maupun investasi melalui promosi budaya/ citra serta pada bidang-bidang yang lainnya. Karenanya hubungan bilateral juga sering digunakan sebagai interaksi strategis yang didorong oleh kepentingan nasional (Pannier, 2020). Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa tantangan utama pada hubungan bilateral antara dua negara adalah bagaimana negara tersebut mampu memenuhi kepentingan mereka masing-masing dengan kerja sama, tanpa mencampuri urusan kedaulatan serta kebebasan negara lainnya.

Dalam hubungan internasional, hubungan bilateral memegang peran penting secara historis hingga dapat ke tingkat hubungan yang lebih luas yaitu multilateralisme atau kerja sama internasional. Hubungan bilateral menjadi tahap penting dalam proses negosiasi internasional, sebab awal pengembangan dan pembentukan kepentingan-kepentingan bersama dilakukan pada level bilateral. Tahapan ini dimanfaatkan oleh negara untuk membentuk koalisi serta mendorong efektivitas ketercapaian kepentingan pada proses negosiasi multilateral (Pannier, 2020). Hal itu menjadikan hubungan bilateral memiliki peran sentral dan menjadi jantung hubungan internasional secara numerik. Meskipun hubungan multilateral telah berkembang secara intens sejak pertengahan abad ke-20, hubungan bilateral hingga hari ini masih disukai menjadi wadah untuk mencapai kesepakatan.

Adanya kesepakatan yang dicapai dalam hubungan bilateral biasanya menghasilkan kerja sama bilateral yang spesifik dalam bidang atau sektor tertentu. Kerja sama ini dapat

terjalin setelah kedua negara secara intens berdiskusi dan bernegosiasi sehingga tercapai pemahaman dan kesepakatan bersama untuk menghasilkan keuntungan yang dapat dinikmati kedua pihak.

Terdapat beberapa alasan bagi suatu negara untuk melakukan kerja sama bilateral maupun internasional, yaitu:

1. Strategi meningkatkan perekonomian dengan meminimalisasi biaya produksi kebutuhan masyarakat yang sebelumnya menjadi beban negara yang memiliki keterbatasan sumber daya.
2. Meningkatkan efisiensi pengeluaran negara melalui pengurangan biaya
3. Menjadi sarana netralisasi bagi potensi ancaman bagi keamanan bersama.
4. Meminimalisasi kerugian dari tindakan individual negara yang dapat berdampak bagi negara lain (Putri, 2019).

Jenis hubungan bilateral berbentuk kerja sama yang biasa disebut dengan kerja sama bilateral dewasa ini memberikan keuntungan besar bagi masing-masing negara. Keuntungan yang dibentuk dari pola hubungan ini tidak terbatas pada kerja sama antara dua negara tetapi juga memberikan keuntungan dari kolaborasi antara sejumlah aktor yang berasal dari kedua negara. Kerja sama bilateral merupakan keadaan dimana dua negara menciptakan suatu hubungan saling mempengaruhi atau timbal balik yang memiliki tujuan membangun perdamaian dunia yang didorong oleh beberapa hal seperti kesamaan budaya, politik, serta struktur ekonomi.

Menurut Holsti (1988), terdapat beberapa variabel yang harus diperhitungkan dalam kerja sama bilateral, di antaranya:

1. Negara harus mempertimbangkan kuantitas, kualitas, serta kapabilitas yang dimiliki
2. Negara memperhitungkan keterampilan dalam mengerahkan kekuatan tersebut untuk mencapai berbagai tujuan nasional
3. Kredibilitas ancaman dan gangguan
4. Derajat ketergantungan dan kebutuhan

5. Tingkat cepat tanggap (responsivitas) para pembuat keputusan (Holsti, 1988).

Berdasarkan pemaparan konseptual mengenai hubungan bilateral khususnya dalam pola kerja sama di atas, dapat dipahami bahwa dalam konsep pengambilan keputusan politik luar negeri yang rasional dan ideal, kerja sama bilateral menjadi pilihan yang rasional dalam memenuhi kepentingan nasional yang tidak mampu dipenuhi sendiri serta dalam menentukan dan memperhitungkan posisi politik nasional di pentas internasional.

### **METODE RISET**

Riset ini dilakukan dengan metode kualitatif dimana teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, yakni mengumpulkan informasi serta data yang relevan melalui sumber-sumber seperti buku, laporan penelitian, artikel jurnal, dan artikel berita daring. Selain itu, teknik analisis data dilakukan dengan serangkaian tahapan seperti pengumpulan data, proses reduksi data, menyajikan data, hasil penelitian, serta penarikan simpulan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN ACFTA dalam Sektor Pertanian**

ACFTA merupakan perjanjian perdagangan bebas negara ASEAN dengan Tiongkok bertujuan untuk mengurangi hingga menghilangkan hambatan perdagangan dan membuka akses pasar jasa dan investasi. Perjanjian perdagangan bebas ini telah disepakati sejak tahun 2002, ketika kepala negara anggota ASEAN dan kepala negara Tiongkok menandatangani Perjanjian Kerangka Kerja Sama Ekonomi Komprehensif antara ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok di Tiongkok pada awal November 2002. Perjanjian kerangka kerja tersebut menjadi kerangka dasar untuk mengimplementasikan ACFTA (Investasean, n.d.).

Protokol kerangka kerja ACFTA telah dilakukan perubahan sebanyak dua kali pada tahun 2003 dan 2006. Perubahan pertama disepakati tanggal 6 Oktober 2003 dan yang

kedua disepakati tanggal 8 Desember 2006. Sesudah berhasil menyetujui kerangka kerja, ASEAN dan Tiongkok juga menyetujui Perjanjian Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdagangan Barang pada 19 November 2004 di Vientiane, Laos. Sedangkan Perjanjian Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdagangan Jasa pada 13 Januari 2007 di Cebu, Filipina. Berdasarkan perjanjian kerangka kerja dan juga perjanjian mekanisme perdagangan barang dan jasa, ACFTA resmi diberlakukan secara penuh di Kawasan ASEAN dan Tiongkok sejak tahun 2010 (Investasean, n.d.).

Pada 2015, ASEAN serta Tiongkok bersama-sama mendorong ACFTA mencapai tingkatan lebih tinggi dengan kembali mengamandemen Perjanjian Kerangka Kerja Sama Ekonomi Komprehensif. ASEAN dan Tiongkok berupaya untuk menciptakan kesepakatan dengan basis mutualisme serta mengupayakan kerja sama ekonomi di sektor perdagangan, kehutanan, pertanian, investasi, perikanan, pengembangan SDM, UMKM, pariwisata, pertukaran jasa, kerja sama sektor industri, teknologi informasi dan komunikasi, transportasi, lingkungan hidup, hak kekayaan intelektual serta sektor lain yang berkaitan dengan kerja sama teknis dan ekonomi yang disetujui oleh tiap pihak yang terlibat (ASEAN.org, 2017).

Dalam kaitannya dengan sektor pertanian, ACFTA memberikan pengaruh yang besar terhadap perdagangan komoditas pertanian antara ASEAN dan Tiongkok. Impor produk pertanian Tiongkok dari negara-negara ASEAN mencapai 150 miliar USD dalam lima tahun ke belakang serta diproyeksikan meroket hingga 200% pada lima tahun ke depan (Global times, 2021). Begitu juga dengan ekspor produk pertanian Tiongkok ke ASEAN yang disebut terus bertumbuh dengan margin intensif sejak ACFTA resmi diberlakukan (Zhi-lu & Xian-de, 2018).

Adapun pada tahap awal pemberlakuan ACFTA pada 2004, perdagangan sektor pertanian menjadi perhatian utama melalui program *early harvest program* (EHP) yang

mengurangi hambatan tarif hingga sekitar 10 sampai 0 persen. Produk pertanian yang termasuk dalam EHP adalah daging dan produk olahan daging, hewan hidup, susu dan produk olahan susu, ikan, produk hewani lainnya, sayuran, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, serta kacang-kacangan. Program ini telah membebaskan tarif sekitar 500 komoditas pertanian (Yang & Chen, 2008).

Selain keunikan-keunikan tersebut, perlu diakui bahwa secara keseluruhan, produk pertanian Tiongkok memiliki daya saing yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Dalam kerangka ACFTA, ASEAN dan Tiongkok berupaya untuk terus meningkatkan hubungan ekonomi mereka dalam sektor pertanian melalui berbagai perjanjian kerja sama pertanian. Pada tahun 2016, ASEAN dan Tiongkok sepakat menjalin kerja sama Sanitari dan Pitosanitary (SPS) yang bertujuan untuk membangun sistem E-sertifikat inspeksi dan karantina produk pertanian agar dapat memudahkan ekspor dan impor komoditas pertanian diantara mereka (Kementan RI, 2016). Selain itu, Tiongkok telah menandatangani lebih dari 30 perjanjian kerja sama pertanian bilateral dengan anggota ASEAN dan mengimplementasikan lebih dari 200 proyek pertukaran teknologi pertanian. Pada tahun 2020, perdagangan bilateral produk pertanian Tiongkok mencapai \$43 miliar, terhitung 17,2 persen dari total perdagangan pertanian luar negeri. Thailand dan Indonesia yang merupakan negara ASEAN termasuk di antara 10 besar sumber impor Tiongkok (Global times, 2021).

### **Potensi Pertanian Indonesia**

Pertanian bagi Indonesia berperan sebagai salah satu sektor paling penting dalam menunjang perekonomian nasional. Hal ini karena sektor pertanian menjadi keunggulan komparatif bagi Indonesia, yaitu dengan sumber daya agraria yang kaya dan beraneka ragam, dilengkapi dengan pangsa pendapatan negara yang kuat. Pentingnya sektor pertanian bagi perekonomian Indonesia terlihat dari jumlah ekspor produk

pertanian yang sangat dominan dan menyerap tenaga kerja yang relatif banyak (Priyono, 2015). Dalam hal ekspor, Indonesia termasuk lima besar negara eksportir pertanian terbesar di dunia. Komoditas pertanian seperti karet, sawit, kakao dan kopi menjadi produk ekspor yang paling banyak diminati di pasar global. Ekspor produk pertanian Indonesia pada masa pandemi juga terus pertumbuhan positif dibandingkan dengan produk ekspor sektor lainnya yang mengalami kontraksi. Ekspor pertanian Indonesia pada tahun 2021 meningkat hingga 15,79% dari 2019, dari hanya sebesar Rp. 390,19 triliun menjadi Rp. 451,77 triliun (Santia, 2021).

Pentingnya sektor pertanian bagi perekonomian nasional menuntut kebijakan khusus agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh positif. Hal itu berusaha dicapai melalui kebijakan luar negeri yang dapat mendukung penguatan kerja sama bilateral dengan negara-negara lain dalam bidang pertanian. Kerja sama bilateral dipandang dapat menjadi pintu masuk untuk pasar yang lebih luas. Selain itu kerja sama bilateral juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur pertanian, peningkatan perdagangan dan investasi, serta peningkatan kapasitas.

Indonesia memiliki keunggulan-keunggulan tertentu dalam sektor pertanian yang dapat menarik negara lain untuk menjalin kerja sama. Indonesia memiliki keunggulan pertanian berupa keanekaragaman hayati, lahan agraris, teknologi, tenaga kerja. Keanekaragaman hayati Indonesia bahkan sangat melimpah dengan memiliki hampir 10% dari jenis tumbuhan yang terdapat di seluruh dunia. Indonesia juga memiliki agraria sangat luas, sekitar 16,36 juta Ha pada tahun 2020 yang terdiri dari 7,46 juta hektar lahan sawah dan 8,9 lahan kebun (Katadata, 2020). Indonesia juga memiliki tenaga kerja pertanian yang sangat besar yang menjadikan sektor pertanian menjadi penyumbang tenaga kerja terbesar di Indonesia. Terdapat sekitar 38.000.000 dari 110.000.000 angkatan kerja di Indonesia yang memenuhi kebutuhan hidup melalui pertanian

dan perkebunan. Indonesia juga mempunyai serangkaian paket teknologi yang efektif dalam mengoptimalkan kualitas, kuantitas, serta produktivitas agraria (Priyono, 2015).

Berdasarkan potensi pertanian yang dimiliki Indonesia tersebut, negara ini memiliki kekuatan untuk melakukan kerja sama dengan negara lain, yaitu (Priyono, 2015):

1. Indonesia merupakan negara tropis dengan produksi komoditas agraris dan tropis lain yang tidak diproduksi di mayoritas mitra, terutama negara-negara di Timur Tengah
2. Kualitas barang produksi Indonesia umumnya lebih baik apabila dikomparasi dengan produk Tiongkok, hal ini memperkuat nilai saing produk Indonesia dikomparasikan dengan hasil Tiongkok.
3. Indonesia mempunyai kekayaan sumberdaya manusia kompeten khususnya di bidang pertanian. Hal ini menyebabkan negara-negara di Timur Tengah dan Afrika memiliki keinginan tinggi untuk mengikuti pelatihan agrarian di Indonesia.
4. Sebagai sebuah negara berkembang, Indonesia mempunyai daya pertumbuhan ekonomi relatif unggul di wilayah Asia Tenggara hingga mantap memberi donor negara-negara miskin di benua Afrika.

Meskipun demikian, Indonesia juga masih memiliki sejumlah permasalahan dalam pembangunan pertanian yang menjadi tantangan dan juga kelemahan. Permasalahan ini umumnya datang dari lahan, infrastruktur, kualitas tenaga kerja, dan akses petani terhadap modal. Selain itu, perubahan lahan tak terkendali serta keterbatasan penciptaan lahan baru membuat ketersediaan pertanahan di Indonesia kian berkurang. Masalah lainnya adalah kualitas lahan Indonesia yang kian hari kian menurun akibat kecerobohan pemakaian pupuk kimia serta pestisida berkelanjutan. Di sisi lain, infrastruktur dan sarana produksi juga berperan dalam memberikan masalah dalam pembangunan agraria di Indonesia. Jumlah jaringan irigasi yang rusak serta kuantitas

sarana pelabuhan dan transportasi ternak lain yang kurang memadai menjadi tantangan infrastruktur yang menghambat pembangunan. Kualitas SDM juga masih kurang dilihat dari rendahnya keahlian petani, pekebun, serta peternak dalam penggunaan teknologi modern menjadi salah faktor penghambat lainnya. Di sisi lainnya, petani semakin sulit mendapatkan akses terhadap modal. Rendahnya aksesibilitas ini terjadi akibat kesulitan dalam memperhitungkan hasil pertanian hingga tunggakan kredit usaha para tani semakin sulit diselesaikan (Priyono, 2015).

Berdasarkan potensi dan tantangan pertanian yang ada, arah kebijakan pertanian Indonesia berfokus untuk pembangunan pertanian yang mendorong perwujudan struktur ekonomi produktif, mandiri serta berdaya saing. Adapun kebijakan agraria Indonesia hingga tahun 2035 memiliki visi untuk membangun pertanian bio-industri yang berkelanjutan serta memproduksi aneka ragam produk dan pangan unggul dengan berdasarkan pada sumberdaya lokal demi kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan. Untuk mencapai cita-cita tersebut, Indonesia juga berupaya untuk menggapai ketahanan pangan dengan menciptakan nilai lebih, daya saing agraria, serta melesatkan kualitas SDM, infrastruktur, sarana agraria (Kemtan RI, 2020).

### **Potensi Pertanian Tiongkok**

Mirip dengan Indonesia, Tiongkok juga merupakan negara produsen, konsumen, dan pedagang pertanian yang besar. Negara ini juga termasuk lima besar negara eksportir komoditas pertanian terbesar di dunia. Berdasarkan data FAO, total ekspor pertanian Tiongkok pada tahun 2018 adalah sekitar 34,9 miliar USD, terdiri dari ekspor sayuran 18 miliar USD, kapas 15 miliar USD, beras 378 juta USD, serta teh hingga 1,5 miliar USD. Komoditas ekspor tersebut dihasilkan dari luas pertanian Tiongkok seluas 5,3 juta km<sup>2</sup>. Data yang diperoleh dari Basf.com menyebutkan bahwa Tiongkok berkontribusi pada sekitar 7% dari keseluruhan lahan pertanian dunia serta

menjadi pemasok makanan bagi 22% populasi dunia (Sofuroh, 2019).

Besarnya sumber daya pertanian dan sejarah agraris panjang yang melekat pada bangsa Tiongkok membuat pemerintah mereka memberikan perhatian yang tinggi terhadap sektor pertanian. Sejak tahun 1978, Tiongkok telah melakukan langkah demi langkah kebijakan reformasi dan keterbukaan, serta percepatan reformasi pertanian dan pembangunan. Khususnya, dalam beberapa tahun terakhir pemerintah telah mengutamakan pekerjaan di bidang pertanian, pedesaan dan petani. Kebijakan pertanian Tiongkok dalam beberapa tahun ini berfokus untuk mewujudkan ketahanan dan keamanan pangan, peningkatan pendapatan petani, penguatan daya saing pertanian, serta perlindungan lingkungan. Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah Tiongkok melibatkan sektor non pertanian untuk mendukung kerangka kelembagaan dan sistem kebijakan yang baik untuk pengembangan sektor pertanian. Hal itu tercermin dalam kebijakan seperti harga pembelian minimum; pembelian dan penyimpanan sementara; target harga dan subsidi pangan langsung; subsidi bahan pertanian, varietas tanaman unggul dan premi asuransi pertanian; dan penghapusan pajak pertanian (OECD, 2018).

Kebijakan pertanian tersebut telah berhasil membuat Tiongkok memproduksi seperempat dari keseluruhan biji-bijian dunia dan menempati peringkat pertama dalam produksi sereal, kapas, buah, sayuran, daging, unggas, telur, dan produk perikanan. Keberhasilan Tiongkok dalam sektor pertanian ini dapat menjadi peluang bagi negara lain termasuk Indonesia untuk menjalin kerja sama pertanian yang dapat mengembangkan sektor pertanian mereka. Tiongkok sendiri merupakan negara yang sangat terbuka untuk menjalin kerja sama pertanian, melalui kerja sama selatan-selatan, Tiongkok secara aktif memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang lainnya dalam mendukung pembangunan pertanian lokal.

Di samping sumber daya dan luas lahan pertanian yang besar, inovasi teknologi juga turut mendukung keberhasilan Tiongkok dalam sektor pertanian mereka. Petani Tiongkok telah menggunakan teknologi tinggi dalam mengelola pertanian mereka. Dengan bantuan subsidi pemerintah, para petani di Tiongkok memperoleh drone untuk otomatisasi penyemprotan air dan pestisida. Tiongkok juga menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan hasil pertanian mereka. Eksperimen AI pertanian strawberry yang telah dilakukan Pinduoduo (platform ecommerce) pada tahun 2017 berhasil meningkatkan produksi strawberry hingga 196 persen. Penggunaan AI juga diterapkan pada perternakan sapi dan babi yang dimanfaatkan untuk membantu petani memantau dan mengelola ternak agar menghasilkan daging yang berkualitas. Selain itu, para petani Tiongkok di pedesaan juga diberikan pelatihan e-commerce dalam memasarkan dan mendistribusikan hasil pertanian mereka oleh Alibaba, JD.com, dan PinDuoDuo. Penggunaan teknologi dalam sektor pertanian berusaha terus ditingkatkan, sejak Mei 2020, pemerintah Tiongkok telah mendorong lebih banyak eksperimen menggunakan AI, data besar, drone, dan mesin pertanian otonom (Juul, 2021).

Jika pertanian Indonesia dibandingkan dengan pertanian di Tiongkok, masih terlihat kesenjangan yang signifikan. Antara lain, teknologi yang digunakan Indonesia dalam sektor pertanian masih tertinggal. Berdasarkan pengamatan dari INDEF, teknologi pertanian di Indonesia masih tradisional karena rendahnya tingkat pendidikan petani dan pelatihan penggunaan teknologi pertanian modern yang masih minim (Liputan6.com, 2020). Kemajuan teknologi pertanian Tiongkok dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama pertanian yang dapat mendorong pertukaran teknologi pertanian antara kedua negara, sehingga teknologi pertanian Indonesia dapat lebih modern dalam era digital ini.

Adapun dalam Dokumen Panduan Kerja Sama Bilateral Pertanian Indonesia-Asia Pasifik disebutkan terdapat potensi-potensi untuk dikembangkan Indonesia dalam kerja sama pertanian dengan Tiongkok, yaitu pengembangan varietas unggul untuk komoditas seperti jagung dan kacang tanah, serta peningkatan kapasitas manajemen pengelolaan ternak. Selain itu, Indonesia harus meningkatkan daya saing komoditas yang memiliki potensi untuk diekspor ke Tiongkok. Beberapa komoditas potensial ini diantaranya aneka anggrek, bunga krisan, manggis, serta mangga. Indonesia juga seharusnya mampu menjaga pangsa pasar untuk komoditas telah banyak diekspor ke Tiongkok, yaitu kopi, kakao, kayu manis, lada, cengkeh, karet, kelapa sawit, pisang, dan kelapa (Priyono, 2015).

### **Kerja Sama Bilateral Indonesia-Tiongkok dalam Bidang Pertanian**

Indonesia dan Tiongkok telah memiliki hubungan bilateral hampir 80 tahun. Dalam hubungan yang panjang ini, kedua negara terus berupaya untuk memperkuat kerja sama bilateral strategis, komprehensif, dan berkelanjutan dalam berbagai bidang, termasuk pertanian. Dalam beberapa tahun belakangan, kedua negara berupaya untuk terus memperkuat kerja sama bilateral mereka dalam bidang pertanian. Diskusi dan negosiasi kerja sama pertanian antara kedua negara terus dilaksanakan, hingga sejumlah perjanjian dalam bidang pertanian berhasil disepakati. Perdagangan komoditas pertanian antara kedua negara juga terus berusaha ditingkatkan.

Perdagangan komoditas pertanian antara kedua negara sejak tahun 2014 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Menurut data dari Kementerian Pertanian, ekspor komoditas pertanian Indonesia ke Tiongkok mengalami peningkatan yang signifikan hingga 33,63 persen pada periode tahun 2014-2018, yaitu dari 2,84 juta ton menjadi 3,85 juta ton. Jumlah ekspor pertanian tersebut tumbuh rata-rata 9,27 persen setiap tahunnya. Adapun pada tahun 2020, ekspor pertanian ke Tiongkok juga masih mengalami peningkatan, yaitu nilainya hingga

4,2 miliar USD. Sementara impor pertanian dari Tiongkok hanya mencapai 2,5 miliar USD. Angka tersebut menunjukkan bahwa neraca perdagangan agraria Indonesia dan Tiongkok untung hingga 1,7 miliar USD yakni setara dengan Rp. 24,13 triliun. Adapun komoditas pertanian yang diekspor ke Tiongkok adalah tanaman pangan seperti kacang hijau, porang, ubi kayu, dan talas; produk hortikultura seperti tanaman biofarmaka, manga, kapulaga; aneka produk perkebunan seperti karet, kelapa, kopi, the, kelapa sawit; dan produk peternakan seperti pakan ternak, babi, obat hewan, susu dan produk olahan susu. Sementara itu, beberapa komoditas agraria yang diimpor dari Tiongkok adalah pir, ginseng, bawang putih, dan gelatin (Kencana, 2021).

Pertumbuhan perdagangan pertanian antara kedua negara didorong oleh adanya kerja sama perdagangan bebas yang telah disepakati bersama dalam perjanjian ACFTA antara negara anggota ASEAN dan Tiongkok sejak tahun 2010. Dengan adanya perdagangan bebas yang menghapuskan tarif dan hambatan lainnya memudahkan negara-negara tersebut dalam melakukan kegiatan perdagangan satu dengan yang lainnya, termasuk antara Indonesia dengan Tiongkok. Perdagangan komoditas pertanian antara kedua negara juga berusaha untuk terus ditingkatkan melalui kerja sama bilateral lainnya. Pada tahun 2013, kedua negara sepakat untuk menjalin kerja sama perdagangan produk pertanian, yaitu diantaranya Protokol Persyaratan Karantina Tumbuhan untuk Ekspor Buah Salak dari Indonesia ke Tiongkok. Pada tahun sebelumnya juga telah disepakati protokol sarang burung walet (Kurniawan, 2013). Berdasarkan kerja sama tersebut, ekspor salak dan sarang burung walet Indonesia ke Tiongkok lebih mudah dilakukan tanpa adanya hambatan administrasi.

Dari keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak sesuai dengan kebutuhannya sebagaimana dijelaskan di atas, dapat dipahami bahwa dalam hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok, baik di bawah kerangka kerja sama ASEAN maupun tidak, keduanya sama-sama mendapatkan variabel-variabel yang ingin

dicapai oleh negara dalam melakukan kerja sama, yakni: peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi sebagian atau seluruh rakyatnya; meningkatkan efisiensi biaya; meminimalisir ancaman keamanan bersama dengan hubungan kerja sama yang bersifat kooperatif alih-alih konfrontatif; serta terakhir menghilangkan kerugian akibat aktivitas yang bersifat individual dari suatu negara yang berdampak bagi negara lain.

Arus utama teori-teori ekonomi menyatakan bahwa dampak liberalisasi perdagangan akan berbeda bagi negara maju dan negara berkembang (Haryadi, 2008) yang artinya secara logika keuntungan yang diraih oleh Indonesia seharusnya tidak akan sebesar keuntungan yang diraup oleh Tiongkok. Sebab, sesuai teori seharusnya negara-negara maju masih terus mendominasi dalam kerja sama perdagangan dunia internasional. Fenomena sebaliknya justru terjadi sebagian besar disebabkan oleh pandemi Covid-19 di tahun 2020 hingga saat ini. Kementerian Perdagangan menyebutkan pandemi Covid-19 sejak awal 2020 telah memberikan momentum perubahan pada pola perdagangan bilateral Indonesia-Tiongkok. Pertumbuhan ekspor Tiongkok memberi optimisme bagi perbaikan neraca dagang Indonesia ke depannya. Secara umum, di tahun 2020, impor Indonesia dari Tiongkok tercatat sebesar 11,79% secara tahunan sementara eksportnya tumbuh sebesar 13,66% (Timorria, 2021). Secara lebih detail lagi, di sektor pertanian, Indonesia juga mengalami peningkatan ekspor sebagaimana pernyataan Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, H.E. Xiao Qian bahwa neraca perdagangan sektor pertanian Indonesia ke Tiongkok surplus hingga US \$1,7 miliar di tahun 2020 dimana nilai ekspor pertanian Indonesia ke Tiongkok mencapai US \$5.9 miliar. Sementara itu, ekspor Tiongkok ke Indonesia agak lesu di sektor yang sama dengan hanya sebesar US\$2,5 miliar (Bangsa, 2021).

Selain kerja sama perdagangan produk pertanian, Indonesia dan Tiongkok juga menjalin kerja sama teknis bidang pertanian

sejak tahun 2017. Kerja sama ini dijalankan oleh IAARD (Kementerian Pertanian Republik Indonesia) dengan CAAS (Chinese Academy of Agricultural Sciences) yang ditujukan untuk meningkatkan pembelajaran, penelitian, pelatihan, pertukaran ilmiah dan teknologi dalam bidang pertanian (Kementan RI, 2017). Pada 2018, Kemendes PDPT juga menjalin kerja sama pertanian dengan Kunming Agriculture Yunnan, Tiongkok. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan petani di kedua negara melalui program Prukades (Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) (Amanda, 2018).

Tiongkok menjadi salah satu mitra dagang paling signifikan bukan hanya untuk Indonesia melainkan untuk ASEAN secara keseluruhan sebab memberikan keuntungan ekonomi sangat besar bagi kawasan. Situasi Pandemi Covid-19 yang terus terjadi sejak awal 2020 hingga saat ini pun tidak menurunkan keuntungan ekonomi yang saling diberikan antara kedua belah pihak. Menurut statistik Tiongkok, meskipun terjadi pandemi, volume perdagangan antara ASEAN dan Tiongkok selama paruh pertama tahun 2020 justru meningkat sebesar 2,2%. Hal ini juga menyebabkan ASEAN melonjak menjadi mitra dagang nomor satu Tiongkok untuk pertama kalinya yang berarti keduanya menjadi mitra dagang utama satu sama lain (ASEAN.org, 2020).

Sementara itu, bagi Indonesia, kerja sama kedua negara di bidang pertanian di bawah payung ACFTA sangat penting, sebab dampaknya bersifat domino yakni kerja sama di bidang pertanian tidak hanya menguntungkan secara agrikultur dan ekonomi, namun juga oleh kedua negara dapat berfungsi untuk melanggengkan berbagai kerja sama dan kepentingan lain yang sama pentingnya bagi pembangunan kedua negara. Sebagai contoh, sebagaimana tujuan pemerintahan Presiden Joko Widodo yakni percepatan dan pemerataan pembangunan nasional, melalui kerja sama yang baik di bidang pertanian, hubungan bilateral antara Indonesia-Tiongkok juga menjadi semakin dekat. Kedekatan secara

bilateral ini mampu meyakinkan Tiongkok untuk berinvestasi di bidang-bidang lainnya seperti berinvestasi pada pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Singkatnya, kesepakatan kerja sama Indonesia-Tiongkok dalam mekanisme ACFTA mampu merealisasikan liberalisasi jasa dan investasi dengan pengaturan tarif yang menguntungkan kedua belah pihak, membuka peluang bagi berbagai bidang kerja sama baru serta mengembangkan kebijakan yang efektif dan ekonomis. Dalam jangka panjang, kerja sama ini diharapkan mampu memperbaiki keadaan perekonomian Indonesia. Kerja sama bilateral kedua negara ini juga sangat potensial untuk dijadikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pertanian masing-masing negara agar bisa lebih bersaing dengan negara lain di dalam dan di luar kawasan. Perdagangan bebas sesuai dengan kerangka ACFTA ini membuat masing-masing negara lebih leluasa melakukan ekspor-impor dengan menghapus tarif atau hambatan lainnya.

Meski perdagangan bebas Indonesia-Tiongkok di bawah payung ACFTA akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dan cukup membanggakan, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti untuk menghindari dominasi perdagangan oleh Tiongkok di Indonesia. Beberapa hal tersebut diantaranya: 1) Negara serta para pelaku usaha menyadari pentingnya inovasi guna menghindari penurunan daya saing barang dalam negeri; 2) Meski di bawah payung perdagangan bebas, Indonesia harus mampu memberi batasan yang jelas berbagai kesepakatan perdagangan bebas dengan Tiongkok untuk menghindari banjir impor produk Tiongkok di Indonesia; 3) Berbagai pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan di tingkat pemerintah baik daerah maupun nasional lebih memperhatikan daya saing industri produk barang jadi untuk meminimalisir risiko deindustrialisasi. Ketika pemerintah dan pelaku usaha bekerja bersama untuk meningkatkan daya saing produksi dan meminimalisir impor dari Tiongkok secara internal dengan kemandirian dalam negeri,

berbagai dampak buruk perdagangan bebas Tiongkok-Indonesia dapat dinetralisir oleh Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Potensi pertanian di Indonesia sangat besar dan sangat penting sebagai penunjang perekonomian nasional karena memiliki keunggulan yang baik dari negara lain serta sektor ini mampu menyerap tenaga kerja cukup banyak, terlebih jumlah ekspor pertanian Indonesia juga banyak. Keunggulan sektor pertanian Indonesia ini sangat beragam dengan berbagai jenis tumbuhan yang 10% dari total tumbuhan yang tersebar di seluruh dunia. Sedangkan pertanian Tiongkok juga cukup baik dan beragam serta memiliki inovasi teknologi yang mendukung keberhasilan Tiongkok dalam pertanian.

Maka dari itu hubungan bilateral yang erat antara Indonesia dan Tiongkok di bidang pertanian menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian kedua negara seperti pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, bibit unggul agar kualitas ekspor-impor pertanian kedua negara menjadi lebih baik dengan tujuan agar masyarakat masing-masing negara lebih sejahtera.

Kerja sama selama ini antara Tiongkok dan Indonesia berjalan dengan cukup baik, meski terdapat beberapa hal yang penting untuk ditingkatkan, misalnya dengan adanya lebih banyak pertukaran IPTEK, bibit unggul, dan ekspor-impor pertanian. Potensi kerja sama bilateral antara Tiongkok dan Indonesia juga penting adanya perdagangan bebas antar kedua negara dengan menghapus tarif agar lebih mudah bersaing dan lebih meningkatkan kualitas pertanian yang mana perdagangan bebas antara Tiongkok dengan negara-negara ASEAN termasuk Indonesia dapat dilakukan di bawah payung ACFTA.

Meski terdapat berbagai tantangan bagi Indonesia dalam kerja sama di sektor pertanian dengan Tiongkok dalam kerangka ACFTA, Indonesia patut berbangga pada surplus neraca perdagangan Indonesia-Tiongkok bagi Indonesia hingga mencapai US \$1,7 miliar di

tahun 2020, dengan nilai ekspor pertanian Indonesia mencapai US \$5.9 miliar. Keberhasilan ini sudah sewajarnya dipertahankan dan terus ditingkatkan dengan menghindari dua hal utama, yakni pertama, membanjirnya produk Tiongkok di Indonesia akibat minimnya daya saing para pelaku usaha di Indonesia; kedua, melemahnya semangat industri di Indonesia agar tidak terjadi deindustrialisasi yang kronis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adibrata, J. A., Azis, A., & Khairi, N. F. (2020). The Impact of Reopening Zheng He's Maritime Silk Road through One Belt One Road Policy on Indonesia-China Cooperation. *Journal of Integrative International Relations*, 5(1), 37-53. doi:10.5281/zenodo.4796017
- Amanda, G. (2018, 10 11). Indonesia-Cina Jalin Kerja Sama Bidang Pertanian. *Republika*: <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/desa-bangkit/18/10/11/pgfvtg423-indonesiacina-jalin-kerja-sama-bidang-pertanian>
- Anwar, D. F. (2019). Indonesia-China Relations: Coming Full Circle. *Southeast Asian Affairs*, 145-161.
- ASEAN.org. (2017). ASEAN - China Free Trade Agreements. ASEAN Organization: [http://asean.org/?static\\_post=asean-china-free-trade-area-2](http://asean.org/?static_post=asean-china-free-trade-area-2)
- ASEAN.org. (2020). Overview: ASEAN-China Economic Relation. <https://asean.org/our-communities/economic-community/integration-with-global-economy/asean-china-economic-relation/>
- Bangsa, R.P. (2021). Dubes Cina: Ekspor Pertanian Indonesia ke Cina Surplus \$ 1,7 M. Diambil dari Gatra: <https://www.gatra.com/news-511624-ekonomi-dubes-cina-ekspor-pertanian-indonesia-ke-cina-surplus-17m.html>
- Barone, A. (2020, 1 29). Free Trade Agreement (FTA). Investopedia: <https://www.investopedia.com/terms/f/free-trade.asp>
- Bertagar.id. (2021). Neraca perdagangan Indonesia terhadap Cina, 2015-2021\*. [lokadata.beritagar.id](https://lokadata.beritagar.id): <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/neraca-perdagangan-indonesia-terhadap-cina-2015-2021-1623813429>
- Dinisari, M. C. (2021, 1 13). Indonesia dan China Sepakati Kerja Sama Two Countries Twin Parks. Diambil kembali dari *Bisnis.com*.
- Global times. (2021, 11 22). China to buy \$150b in farm goods from ASEAN, almost double current level. Diambil kembali dari *Global Times*: <https://www.globaltimes.cn/page/202111/1239626.shtml>
- Gould, D. M., Woodbridge, G. L., & Ruffin, R. J. (2015). The Theory and Practice of Free Trade. Dalam D. M. Gould, *Economic Review* (hal. 1-16). Dallas: Federal Reserve Bank of Dallas.
- Haryadi. (2008). Dampak Liberalisasi Perdagangan Pertanian Terhadap Perekonomian Negara Maju dan Berkembang. [Disertasi]. Sekolah Pascasarjana, Bogor. Institut Pertanian Bogor.
- Holsti, K.J. (1988). *International Politics: A Framework for Analysis*. Prentice-Hall: Englewood Cliffs, N.J.
- Investasean. (t.thn.). ASEAN-China Free Trade Area. Diambil kembali dari ASEAN.org: <http://investasean.asean.org/index.php/page/view/free-trade-areas/view/734/newsid/776/aseanchina-free-trade-area.html>
- Juul, L. H. (2021, 5 6). How tech is transforming agriculture in China. Diambil kembali dari *China Experience*: <https://www.china-experience.com/china-experience-insights/how-tech-is-transforming-agriculture-in-china>
- Katadata. (2020, 2 4). Indonesia Miliki Luas Baku Sawah 7,46 Juta Hektare. Diambil kembali dari *Databoks Katadata*: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/>

- 2020/02/05/indonesia-miliki-luas-baku-sawah-746-juta-hektare  
 Katadata.co.id. (2021, 10 27). Nilai Penanaman Modal Asing (PMA) Tiongkok ke Indonesia (2016-September 2021). Diambil kembali dari databoks.katadata.co.id: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/29/investasi-tiongkok-ke-indonesia-capai-us-23-miliar-hingga-september-2021>
- Kementan RI. (2016, 9 14). ASEAN - CHINA : Sepakati Sistem E-Sertifikat Inspeksi dan Karantina. Diambil kembali dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia: <https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=1748>
- Kementan RI. (2017, 11 30). Momenandum Saling Pengertian antara Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan The Chinese Academy . Diambil kembali dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia : <https://www.litbang.pertanian.go.id/kerjasama/2019/mou-ln-CAAS-2017-IND.pdf>
- Kemtan RI. (2020). Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024. Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Kencana, M. R. (2021, 5 11). Neraca Dagang Pertanian Indonesia-China Surplus Rp 24 Triliun. Diambil kembali dari Liputan6.com: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4555512/neraca-dagang-pertanian-indonesia-china-surplus-rp-24-triliun>
- Kurniawan, T. (2013, 5 22). Indonesia-China Perkuat Kerja Sama Ekspor dan Impor Produk Pertanian. Diambil kembali dari Berita Satu: <https://www.beritasatu.com/ekonomi/115318/indonesiachina-perkuat-kerja-sama-ekspor-dan-impor-produk-pertanian>
- Liputan6.com. (2020, 2 11). Teknologi Industri Pertanian Indonesia Tertinggal, Ini Sebabnya. Diambil kembali dari Liputan6.com: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4176569/teknologi-industri-pertanian-indonesia-tertinggal-ini-sebabnya>
- Longley, R. (2018, 12 5). What Is Free Trade? Definition, Theories, Pros, and Cons. Diambil kembali dari Thoughtco.: <https://www.thoughtco.com/free-trade-definition-theories-4571024>
- OECD. (2018). Agricultural policy in China. Dalam OECD, Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in China. New York: OECD. doi:<https://doi.org/10.1787/24114278>
- Pannier, A. (2020). Bilateral Relations. Dalam T. Balzacq, F. Charillon, & F. Ramel, Global Diplomacy: An Introduction to Theory and Practice (hal. 19-34). Cham: Palgrave Macmillan.
- Perwira, A. Y. (2019). Kerjasama BNN (Badan Narkotika Nasional) Indonesia dan NNCC (National Narcotics Control Commissions) Tiongkok dalam Menanggulangi Perdagangan Narkotika Asal Tiongkok di Indonesia Tahun 2012 - 2018. *Journal of International Relations*, 5(1), 1059-1066.
- Prameswari, A. A. A. I. (2020). ECONOMIC INTEGRATION AND REGIONAL STABILITY Study Case: ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT. Retrieved June 20, 2022, from Udayana Networking website: <https://udayananetworking.unud.ac.id/lecturer/scientific/778-anak-agung-ayu-intan-parameswari/economic-integration-and-regional-stability-study-case-asean-china-free-trade-agreement-1359>
- Priyono, H. (2015). Buku Panduan Kerja Sama Bilateral Bidang Pertanian: Indonesia-Asia Pasifik. Jakarta: Pusat Kerja Sama Luar Negeri-Kementerian Pertanian RI.
- Ravenhill, J. (2006). The political economy of the new Asia-Pacific bilateralism: benign, Banal, or simply bad? In V. Aggarwal & S. Urata (Eds.), *Bilateral Trade Agreements in the Asia-Pacific: Origins, Evolution, and Implications* (First Edit, pp. 27-49). London: Routledge.
- Santia, T. (2021, 12 31). Jelang Tutup Tahun 2021, Indonesia Ekspor Produk Pertanian Rp 14 T ke 124 Negara. Diambil kembali dari Liputan6.com:

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4847616/jelang-tutup-tahun-2021-indonesia-ekspor-produk-pertanian-rp-14-t-ke-124-negara>

- Sofuroh, F. U. (2019, 9 23). Indonesia Masuk 5 Besar Eksportir Pertanian Terbaik di Dunia. Diambil kembali dari Detik.com: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4718604/indonesia-masuk-5-besar-eksportir-pertanian-terbaik-di-dunia>
- Timorria, I.F. (2021). Pertumbuhan Ekspor RI ke Cina Bisa Lebih Tinggi dari Impor. Diambil kembali dari Bisnis ID: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210826/12/1434542/pertumbuhan-ekspor-ri-ke-china-bisa-lebih-tinggi-dari-impor>
- Vidianty, R. (2015). Motivasi Indonesia Menjalin Kerjasama Bidang Kedirgantaraan dengan Tiongkok. *JOM FISIP*, 2(2), 1-18.
- Yang, J., & Chen, C. (2008). Agricultural trade between China and ASEAN: Dynamics and prospects. Dalam C. Chen, & R. Duncan, *Agriculture and Food Security in China: What Effect WTO Accession and Regional Trade Arrangements?* (hal. 346-371). Canberra: ANU Press.
- Zhi-lu, S., & Xian-de, L. (2018). The trade margins of Chinese agricultural exports to ASEAN and their determinants. *Journal of Integrative Agriculture*, 17(10), 2356–2367. doi:10.1016/S2095-3119(18)62084-2

## **BIOGRAFI**

**Karina Saphira** merupakan alumni Prodi Hubungan Internasional yang tertarik mengkaji tentang kerja sama internasional dan kawasan.

**R. Widya Setiabudi Sumadinata** merupakan pengajar pada Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran yang tertarik mengkaji mengenai metodologi, Studi keamanan dan juga ASEAN.

**Dina Yulianti** merupakan pengajar pada Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran yang tertarik mengkaji mengenai Timur Tengah.